

ANALISIS KEBIJAKAN KEBUTUHAN GURU DAN ALTERNATIF KEBIJAKANNYA PADA JENJANG SMA NEGERI SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

POLICY ANALYSIS OF TEACHER DEMAND AND ITS POLICY ALTERNATIFS AT THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA STATE HIGH SCHOOL LEVEL

Oleh: Dita Nurlaeli Izhati, Universitas Negeri Yogyakarta

Dita1909fip.2017@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis kebutuhan guru dan alternatif kebijakan untuk memenuhi kebutuhan guru SMA Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode campuran sekuensial *sequential mixed methods* terutama strategi eksplanatoris sekuensial. Data kuantitatif dianalisis menggunakan perhitungan sederhana dengan rumus menurut Peraturan Bersama 5 Menteri tahun 2011, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian analisis kebutuhan guru SMA Negeri se-DIY menunjukkan bahwa 8 mata pelajaran memiliki kebutuhan jumlah guru diantaranya adalah: Fisika 35 guru, Biologi 32 guru, Kimia 24 guru, Ekonomi 22 guru, PPKN 13 guru, Matematika 4 guru, Sosiologi dan Geografi 11 guru. Kekurangan jumlah guru terdapat 2 mata pelajaran yaitu; PJOK 4 guru, dan Bahasa Indonesia 1 guru. 1 mata pelajaran yang dapat diatasi dengan sistem mutasi yaitu mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa. Alternatif kebijakan pada penelitian ini adalah; 1) Membuat proyeksi guru pensiun, 2) Sekolah mengajukan permintaan formasi guru ke Dinas Pendidikan dengan catatan *urgent*, 3) Pengajuan formasi kebutuhan guru ke BKD dilakukan setiap semester pembelajaran, 4) Penataan kembali untuk sekolah yang memiliki data kebutuhan guru, 5) Membuat daftar mutasi guru, 6) Aplikasi SIYAP ditambahkan fitur publikasi data, 7) Monitoring kebijakan kebutuhan guru dilakukan secara berkala, 8) Guru PNS dimutasikan ke Provinsi lain yang membutuhkan kekurangan jumlah guru, 9) Guru non PNS yang termasuk dalam hitungan kelebihan jumlah guru di rumahkan.

Kata kunci: analisis kebijakan, kebutuhan guru, alternatif kebijakan

Abstract

This study aims to describe the analysis of teacher needs and policy alternatives to meet the needs of state high school teachers in the Special Region of Yogyakarta. This study uses sequential mixed methods, especially sequential explanatory strategies. Quantitative data were analyzed using simple calculations with the formula according to the 5 Ministerial Joint Regulations (2011), while qualitative data were analyzed using the interactive Miles and Huberman model. The results of the analysis of the needs of teacher demand for state high schools in the Special Region of Yogyakarta show that 8 subjects have a need for the number of teachers including: 35 teachers for Physics, 32 teachers for Biology, 24 teachers for Chemistry, 22 teachers for Economics, 13 teachers for Civics Education, Mathematics subjects 4 teachers, Sociology and Geography subjects 11 teachers. There is a shortage of teachers in 2 subjects namely; 4 teachers for Physical Education subjects, and 1 teacher for Indonesian subjects. 1 subject that can be overcome by the mutation system, namely the Javanese Language Local Content subject. Policy alternatives in this study are; 1) Making projections for retired teachers, 2) Schools submit requests for teacher formation to the Education Office with urgent notes, 3) The process of submitting the formation of teacher needs to the Local Personnel Agency is carried out every learning semester, 4) Rearrangement for schools that have data on teacher needs, 5) Make a list teacher mutations, 6) The SIYAP application has added data publication features, 7) Monitoring of teacher demand policies is carried out regularly, 8) Teachers Civil Servants are transferred to other provinces that need a shortage of teachers, 9) Teachers with non-Civil Servant status who exclude the ideal calculation can be laid off.

Keywords: policy analysis, teacher demand, policy alternatif

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebuah usaha untuk investasi peradaban. Pendidikan dapat mendidik anak bangsa menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dapat dilaksanakan secara formal, non formal maupun informal. Melaksanakan pendidikan memang banyak melibatkan berbagai pihak agar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Pendidikan yang baik harus diupayakan di setiap wilayah di Indonesia. Salah satu provinsi yang pengembangan pendidikannya baik adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini sering menjadi contoh bagi wilayah lain, tidak jarang juga sekolah-sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan *pilot project* program atau kebijakan baru yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

Pembangunan manusia yang baik di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri didukung dengan adanya pendidikan yang baik di dalamnya, guru yang tersedia juga cukup banyak meski dalam kenyataannya di sekolah masih banyak guru yang kekurangan dan kelebihan jumlah jam mengajar. Permasalahan kelebihan dan kekurangan jumlah jam mengajar guru ini membuat penggunaan waktu guru menjadi kurang efisien. Maka dari itu, dibutuhkan perencanaan atau analisis kebutuhan guru agar tidak terjadi kelebihan dan kekurangan jam mengajar. Isma, Murniati, dan Niswanto (2017:253) menjelaskan perencanaan kebutuhan guru adalah proses untuk menentukan jumlah guru yang dibutuhkan agar tenaga guru dapat terpenuhi dan seimbang antara permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*) guru. Perencanaan kebutuhan guru adalah sebuah usaha yang

dilakukan oleh dinas pendidikan agar persediaan guru tidak berlebihan ataupun kekurangan di sekolah.

UU No 14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen pasal 35 ayat 2 menyatakan bahwa beban kerja guru mengajar sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Permendikbud No 15 Tahun 2018, pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal. Berdasarkan dua kebijakan tersebut, dapat digunakan untuk dasar menghitung data Jumlah Jam Mengajar (JJM) guru.

Permasalahan Jumlah Jam Mengajar (JJM) guru ini tidak terlepas dari pemerataan dan penataan guru. Penyebab permasalahan penataan guru secara umum di antaranya: 1) sistem informasi guru yang belum berguna secara maksimal, 2) pengelolaan sumber daya pendidik di tingkat kabupaten atau kota tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah melainkan hanya kebutuhan pribadi guru, 3) tidak ada pelaporan data guru secara berkala, 4) tidak ada kebijakan bagi sekolah yang kelebihan guru, 5) adanya perasaan nyaman jika guru mengajar di daerah perkotaan dibanding daerah pedesaan karena fasilitas perkotaan yang lebih memadai (Wiwik & Mada, 2015). Permasalahan penataan guru bisa terjadi karena tidak adanya pelaporan data guru secara berkala baik dari guru ataupun admin sekolah yang berkewajiban mengunggah data di sebuah sekolah.

Pemerintah juga sudah membuat kebijakan bersama terkait permasalahan pemerataan dan penataan guru. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Bersama

Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 154/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil. Dalam kebijakan ini menjelaskan pada bab III tentang kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota pasal 4 ayat 3 bahwa Gubernur bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga pasal 4 menjelaskan bahwa dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Selanjutnya pada pasal 5 bagian f yaitu penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus. Dua pasal di atas sudah membuktikan bahwa gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan PNS sesuai peraturan bersama lima menteri pasal 4 ayat 3.

Dari 69 SMA Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 41 sekolah masih memiliki kelebihan dan kekurangan jam mengajar mata pelajaran Matematika. Dari 41 sekolah yang memiliki kelebihan

jam mengajar pada mata pelajaran Matematika adalah 20 sekolah sedangkan yang memiliki kurang jam mengajar 21 sekolah. Selain mata pelajaran Matematika ada mata pelajaran Bahasa Indonesia dari 69 SMA Negeri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 31 sekolah yang masih memiliki kelebihan dan kekurangan jam mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia (Dinas Dikpora, 2020). Data dari dua mata pelajaran umum tersebut membuktikan masih banyak kebutuhan guru jenjang SMA Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan aplikasi untuk melaporkan jumlah guru dan jumlah jam mengajar guru yang di unggah oleh admin masing-masing sekolah. Aplikasi ini dikelola oleh admin seksi Pembinaan Karier dan Pengembangan Profesi (PKPP). Pada kenyataannya, data yang di unggah di aplikasi milik dinas ini tidak sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan oleh dinas. Masih banyak kebutuhan jumlah guru dilihat dari data Jumlah Jam Mengajar (JJM) sehingga membuat penggunaan waktu kurang efisien. Penyebab permasalahan ini bisa terjadi karena admin sekolah atau bahkan guru yang kurang teliti untuk mengunggah di aplikasi, sistem informasi guru yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh guru, tidak adanya pelaporan data guru secara berkala dan tidak adanya kebijakan bagi sekolah yang kelebihan guru pada mata pelajaran. Hal ini dapat mempengaruhi informasi data yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuat analisis kebutuhan guru di tiap SMA.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kebutuhan guru SMA Negeri di

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul “Analisis Kebijakan Kebutuhan Guru dan Alternatif Kebijakannya pada Jenjang SMA Negeri Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”. Peneliti akan menggunakan teori yang ditawarkan oleh Patton dan Sawicki (1986) dengan enam tahapan namun penelitian ini hanya menggunakan lima tahapan pada proses analisis kebijakannya yaitu; 1) mengidentifikasi, verifikasi dan mendetailkan permasalahan kebijakan, 2) menetapkan kriteria evaluasi, 3) mengidentifikasi alternatif, 4) evaluasi alternatif kebijakan, dan 5) menyajikan alternatif kebijakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran sekuensial/bertahap (*sequential mixed methods*) terutama strategi eksplanatoris sekuensial (*explanatory sequential*). Creswell & Clark (2011) dalam Arini (2018) mengemukakan bahwa pada strategi ini terdapat 2 fase berurutan atau sekuensial yang interaktif.

Tahap pertama dilakukan pengambilan dan analisis data kuantitatif yang mana memiliki prioritas untuk menjawab pertanyaan penelitian sedangkan tahap berikutnya adalah fase pengambilan data kualitatif dilakukan mengikuti fase sebelumnya. Hal yang dilakukan peneliti dengan metode penelitian kuantitatif dalam menjawab rumusan masalah pertama, yakni kebutuhan guru jenjang SMA Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil data sekunder berupa rekapitulasi kebutuhan guru SMA Negeri di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah mendapatkan data dari metode

tersebut maka peneliti melanjutkan dengan tahap kedua, mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dalam hal ini untuk menjawab rumusan masalah kedua, yakni alternatif kebijakan kebutuhan guru jenjang SMA Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September s/d Desember 2021. Tempat penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Jl. Cendana No.9, Semaki, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data kebutuhan guru jenjang SMA se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 229 sekolah. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel sebagai berikut: a) Guru Sekolah Menengah Atas, b) Sekolah Menengah Atas yang berstatus Negeri berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, c) SMA yang memiliki mata pelajaran Matematika, PJOK, PKN, Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, Geografi, Sosiologi, Ekonomi, Kimia, Fisika dan Biologi, d) Sekolah Menengah Atas Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki data kebutuhan guru yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan teknik sampel di atas dari populasi 229 SMA se-Daerah Istimewa Yogyakarta maka sampel

penelitian ini adalah 69 SMA Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Kepala Seksi beserta staf seksi Pembinaan Karier dan Pengembangan Profesi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

a. Data Kuantitatif

Penelitian ini membutuhkan data kuantitatif berupa rekapitulasi data kebutuhan guru mata pelajaran Matematika, PJOK, PKN, Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Fisika, Kimia dan Biologi.

b. Data Kualitatif

Data Kualitatif dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan subjek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data diperoleh dari dokumen grafis, foto, film, rekaman video dan lain-lain. Peneliti mengumpulkan data dari sumber sekunder untuk data kuantitatif berupa rekapitulasi data kebutuhan guru SMA Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah terpilih sebagai sampel. Data ini diambil dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara

Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung data-data yang telah diperoleh untuk melengkapi hasil penelitian. Proses wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kepala Seksi dan Staff sie Pembinaan Karier dan Pembinaan Profesi (PKPP) dan guru SMA.

Teknik Analisis Data

a. Menghitung Kebutuhan Guru

Rumus untuk menghitung kebutuhan guru menurut petunjuk teknis Peraturan Bersama Lima Menteri (2011), yaitu sebagai berikut:

Keterangan:

$$KG = \frac{JTM}{24} = \frac{MP1 \times \sum K1 + (MP2 \times \sum K2) + (MP3 \times \sum K3)}{24}$$

KG : Kebutuhan Guru

JTM : Jumlah tatap muka per jenis guru per minggu

MP : Alokasi jam mata pelajaran per minggu

$\sum K$: Jumlah kelas pada satu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu

24 : Jam wajib mengajar per minggu.

1,2,3 : tingkat 1,2 dan 3.

b. Model Interaktif

Model interaktif digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Analisis data menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2020: 332) dengan model interaktif yaitu: data *collection* (pengumpulan data), data *condensation* (kondensasi data), data *display* (penyajian data), dan *concluding drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Masalah Kebutuhan Guru SMA

Selama proses analisis, seorang peneliti harus mampu mengidentifikasi ulang masalah agar masalah itu dapat dipecahkan. Proses ini disebut pemecahan masalah terbalik (*backward problem solving*). Pada penelitian ini memaparkan tentang permasalahan kebutuhan guru SMA negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Permasalahan penataan guru SMA negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 sesuai dengan data penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang kekurangan guru dan kelebihan guru mata pelajaran yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Kebutuhan Guru SMA Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

Mata Pelajaran	Kabupaten/ Kota	Kekurangan Guru	Kelebihan Guru	Guru Mutasi	Ketersediaan Guru
Matematika	Yogyakarta	0	2	2	4
	Sleman	1	5	4	
	Bantul	5	3	-2	
	Gunung Kidul	5	2	-3	
	Kulon Progo	0	3	3	
PJOK	Yogyakarta	2	2	0	-4
	Sleman	3	3	0	
	Bantul	4	1	-3	
	Gunung Kidul	1	0	-1	
	Kulon Progo	2	2	0	
Muatan Lokal Bahasa Jawa	Yogyakarta	2	0	-2	0
	Sleman	1	1	0	
	Bantul	5	4	-1	
	Gunung Kidul	1	2	1	
	Kulon Progo	0	2	2	
PPKN	Yogyakarta	0	3	3	13
	Sleman	0	5	5	
	Bantul	2	1	-1	
	Gunung Kidul	0	4	4	

Mata Pelajaran	Kabupaten/ Kota	Kekurangan Guru	Kelebihan Guru	Guru Mutasi	Ketersediaan Guru
B. Indonesia	Kulon Progo	1	3	2	-1
	Yogyakarta	1	2	1	
	Sleman	4	2	-2	
	Bantul	2	2	0	
	Gunung Kidul	1	2	1	
Ekonomi	Kulon Progo	2	1	-1	22
	Yogyakarta	1	0	-1	
	Sleman	1	7	6	
	Bantul	0	7	7	
	Gunung Kidul	0	7	7	
Sosiologi	Kulon Progo	0	3	3	11
	Yogyakarta	0	1	1	
	Sleman	0	2	2	
	Bantul	1	4	3	
	Gunung Kidul	0	1	1	
Geografi	Kulon Progo	0	4	4	11
	Yogyakarta	0	1	1	
	Sleman	0	6	6	
	Bantul	0	3	3	
	Gunung Kidul	1	1	0	
Fisika	Kulon Progo	0	1	1	35
	Yogyakarta	1	5	4	
	Sleman	1	9	8	
	Bantul	0	12	12	
	Gunung Kidul	0	5	5	
Kimia	Kulon Progo	0	6	6	24
	Yogyakarta	4	0	-4	
	Sleman	0	6	6	
	Bantul	0	12	12	
	Gunung Kidul	0	4	4	
Biologi	Kulon Progo	1	7	6	32
	Yogyakarta	1	4	3	
	Sleman	0	5	5	
	Bantul	0	8	8	
	Gunung Kidul	1	9	8	
	Kulon Progo	0	8	8	

Sumber: Olah Data

Berdasarkan olah data pada tabel 1. di atas ada 8 mata pelajaran yang memiliki kebutuhan jumlah guru. mata pelajaran Fisika memiliki kelebihan jumlah guru paling tinggi yaitu sebanyak 35 guru.

Selanjutnya secara berturut-turut diikuti dengan mata pelajaran Biologi yang memiliki kelebihan jumlah guru sebanyak 32 guru. lalu mata pelajaran Kimia dengan 24 guru, mata pelajaran Ekonomi 22 guru, mata pelajaran PPKN 13 guru, mata pelajaran Sosiologi dan geografi sebanyak 11 guru, dan mata pelajaran Matematika sebanyak 4 guru. Kekurangan jumlah guru terdapat 2 mata pelajaran yaitu; mata pelajaran PJOK sebanyak 4 guru, dan mata pelajaran Bahasa Indonesia sebanyak 1 guru. Ada 1 mata pelajaran yang dapat diatasi dengan sistem mutasi yaitu mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa.

Tabel 2. Guru PNS dan Non PNS SMA Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta

Mata Pelajaran	Kabupaten/ Kota	Guru PNS	Guru Non PNS	Keterse diaan Guru
Matematika	Yogyakarta	67	10	4
	Sleman	67	5	
	Bantul	79	18	
	Gunung Kidul	33	5	
	Kulon Progo	37	4	
PJOK	Yogyakarta	18	14	-4
	Sleman	15	16	
	Bantul	27	15	
	Gunung Kidul	16	4	
	Kulon Progo	17	2	
Muatan Lokal Bahasa Jawa	Yogyakarta	7	12	0
	Sleman	20	2	
	Bantul	16	15	
	Gunung Kidul	8	8	
	Kulon Progo	4	10	
PPKN	Yogyakarta	21	3	13
	Sleman	26	1	
	Bantul	29	1	
	Gunung Kidul	18	1	
	Kulon Progo	12	2	
B. Indonesia	Yogyakarta	33	9	-1
	Sleman	35	7	
	Bantul	56	6	
	Gunung Kidul	28	1	
	Kulon Progo	20	2	

Mata Pelajaran	Kabupaten/ Kota	Guru PNS	Guru Non PNS	Keterse diaan Guru
Ekonomi	Yogyakarta	18	0	22
	Sleman	30	0	
	Bantul	43	1	
	Gunung Kidul	26	0	
	Kulon Progo	17	1	
Sosiologi	Yogyakarta	12	1	11
	Sleman	22	1	
	Bantul	25	3	
	Gunung Kidul	12	4	
	Kulon Progo	15	2	
Geografi	Yogyakarta	14	2	11
	Sleman	24	2	
	Bantul	25	5	
	Gunung Kidul	14	3	
	Kulon Progo	11	1	
Fisika	Yogyakarta	35	1	35
	Sleman	32	2	
	Bantul	50	1	
	Gunung Kidul	19	1	
	Kulon Progo	19	1	
Kimia	Yogyakarta	26	2	24
	Sleman	32	1	
	Bantul	50	0	
	Gunung Kidul	20	0	
	Kulon Progo	18	3	
Biologi	Yogyakarta	35	0	32
	Sleman	29	1	
	Bantul	49	0	
	Gunung Kidul	26	0	
	Kulon Progo	24	2	

Sumber: Olah Data

Pada Tabel 2. dapat diketahui bahwa mata pelajaran Matematika menunjukkan ketersediaan sebesar 4 guru terdiri dari 4 guru non PNS. Mata pelajaran PJOK memiliki kekurangan sebesar 4 guru, sudah dibantu dengan 51 guru non PNS tetapi masih kurang guru mata pelajaran PJOK. Mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa tidak memiliki ketersediaan guru karena sudah bisa diatasi dengan sistem mutasi. Mata pelajaran PPKN menunjukkan ketersediaan sebesar 13 guru terdiri dari 8

guru non PNS dan 5 guru PNS. Mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki kekurangan sebesar 1 guru, sudah dibantu dengan 25 guru non PNS tetapi masih kurang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Ekonomi menunjukkan ketersediaan sebesar 22 guru terdiri dari 2 guru non PNS dan 20 guru PNS. Mata pelajaran Sosiologi menunjukkan ketersediaan sebesar 11 guru terdiri dari 11 guru non PNS. Mata pelajaran Geografi menunjukkan ketersediaan sebesar 11 guru terdiri dari 11 guru non PNS. Mata pelajaran Fisika memiliki ketersediaan sebesar 35 guru terdiri dari 6 guru non PNS dan 29 guru PNS. Mata pelajaran Kimia menunjukkan ketersediaan sebesar 24 guru terdiri dari 6 guru non PNS dan 18 guru PNS. Mata pelajaran biologi menunjukkan ketersediaan sebesar 32 guru terdiri dari 3 guru non PNS dan 29 guru PNS.

Berdasarkan temuan data penelitian permasalahan tidak meratanya guru SMA Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan karena:

a. Guru pensiun, hal ini sebenarnya dapat diantisipasi karena pasti sudah ada format pensiun di awal tahun ajaran baru sehingga secepat mungkin Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mempersiapkan guru pengganti dengan cara mengajukan formasi kebutuhan guru ke BKD. Tetapi walaupun dapat diantisipasi namun dari pihak Dinas Pendidikan tidak melakukan perhitungan prediksi guru pensiun, hanya menunggu pelaporan setiap 1 semester sekali kebutuhan guru. Kebutuhan guru memang dilaporkan secara berkala setiap 1 semester sekali namun tidak memunculkan data guru yang akan pensiun sehingga ketika guru yang sudah mendekati tanggal pensiun

pada saat perhitungan kebutuhan guru tetap dianggap terpenuhi. Data kebutuhan guru akan berubah menjadi kekurangan guru pada pelaporan semester berikutnya yang jelas guru sudah pensiun.

- b. Meninggal dunia, untuk guru yang meninggal dunia ini tidak bisa diprediksi dan terjadi secara tiba-tiba. Untuk permasalahan guru meninggal dunia sekolah melaporkan ke dinas dan akan dibuatkan pengajuan proposal formasi kebutuhan guru ke BKD tetapi karena untuk hal ini memerlukan proses dan tidak bisa langsung terpenuhi.
- c. Guru mata pelajaran juga menjabat sebagai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah sehingga data jam mengajarnya berbeda. Maka dari itu dapat mempengaruhi bahwa perhitungan kebutuhan guru bisa saja menunjukkan kelebihan maupun kekurangan.
- d. Proses pengajuan formasi kebutuhan guru ke BKD yang hanya berjalan setiap 1 tahun sekali. Sebenarnya untuk permintaan kebutuhan guru ke pihak dinas dapat dilakukan setiap saat, namun untuk pengajuan formasi kebutuhan guru tetap dilakukan 1 tahun sekali.
- e. Sistem mutasi kurang efektif untuk permasalahan kebutuhan guru, sebenarnya sistem mutasi ini sudah berjalan baik namun memiliki kekurangan yaitu mutasi guru ini memiliki beberapa persyaratan baik itu dari guru maupun dinas agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Persyaratan utama adalah jarak tempuh guru dari rumah ke sekolah yang memiliki kekurangan guru, hal ini menjadi masalah utama karena dalam beberapa kasus sekolah yang kelebihan guru di daerah A (Sleman) dan sekolah yang kekurangan guru di daerah B

(Gunungkidul) dengan jarak yang begitu jauh tentu dapat menimbulkan permasalahan baru bagi guru yang dimutasi. Maka dari itu, untuk mutasi guru harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti ini bahkan usia guru dapat menjadi pertimbangan. Jika mutasi di usia mendekati pensiun tentu akan sulit melakukan mobilisasi ke sekolah lain yang jaraknya lebih jauh dari tempat tinggalnya. Selain itu, mutasi lebih sering diajukan karena keinginan pribadi.

- f. Jumlah mata pelajaran yang memiliki kelebihan guru lebih banyak dibandingkan kekurangan guru. 8 mata pelajaran kelebihan jumlah guru. mata pelajaran Fisika memiliki kelebihan jumlah guru paling tinggi yaitu sebanyak 35 guru. Selanjutnya secara berturut-turut diikuti dengan mata pelajaran Biologi yang memiliki kelebihan jumlah guru sebanyak 32 guru. Lalu mata pelajaran Kimia dengan 24 guru, mata pelajaran Ekonomi 22 guru, mata pelajaran PPKN 13 guru, mata pelajaran Sosiologi dan geografi sebanyak 11 guru, dan mata pelajaran Matematika sebanyak 4 guru. Kekurangan jumlah guru terdapat 2 mata pelajaran yaitu; mata pelajaran PJOK sebanyak 4 guru, dan mata pelajaran Bahasa Indonesia sebanyak 1 guru. Ada 1 mata pelajaran yang dapat diatasi dengan sistem mutasi yaitu mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa.
- g. Sistem aplikasi SIYAP (Sistem Informasi Layanan Kepegawaian) yang dibuat oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya menampilkan kebutuhan guru. Tidak ada proyeksi untuk guru yang pensiun agar dapat ditangani sedini mungkin. Selain itu,

yang dapat mengakses aplikasi ini hanya pihak Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah yang datanya diolah oleh Dinas Pendidikan. Tidak ada transparansi data untuk masyarakat umum. Transparansi data pada aplikasi dapat memudahkan para guru baru yang belum mendapatkan pekerjaan untuk mencari pekerjaan jika ada sekolah yang memiliki kekurangan tenaga guru dapat melamar menjadi naban di sekolah tersebut.

- h. Monitoring kebijakan kebutuhan guru hanya diambil beberapa sekolah untuk didatangi, padahal bisa saja monitoring dilakukan secara berkala setiap bulan agar semua sekolah dapat memiliki kesempatan diberikan monitoring dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- i. Data kebutuhan jumlah guru berdasarkan status PNS dan non PNS lebih banyak guru berstatus PNS yang masuk dalam hitungan kelebihan guru sehingga tidak efisien, data tersebut menunjukkan sebagai berikut: 8 mata pelajaran yang memiliki kebutuhan jumlah guru. Mata pelajaran Fisika memiliki kelebihan jumlah guru paling tinggi yaitu sebanyak 35 guru terdiri dari 6 guru non PNS dan 29 guru PNS. Selanjutnya secara berturut-turut diikuti dengan mata pelajaran Biologi yang memiliki kelebihan jumlah guru sebanyak 32 guru terdiri dari 3 guru non PNS dan 29 guru PNS. lalu mata pelajaran Kimia dengan 24 guru terdiri dari 6 guru non PNS dan 18 guru PNS, mata pelajaran Ekonomi 22 guru terdiri dari 2 guru non PNS dan 20 guru PNS, mata pelajaran PPKN 13 guru terdiri dari 8 guru non PNS dan 5 guru PNS, mata pelajaran Sosiologi sebanyak 11 guru terdiri dari 11 guru non PNS, mata

pelajaran Geografi sebanyak 11 guru terdiri dari 11 guru non PNS, dan mata pelajaran Matematika sebanyak 4 guru terdiri dari 4 guru non PNS. Kekurangan jumlah guru terdapat 2 mata pelajaran yaitu; mata pelajaran PJOK sebanyak 4 guru padahal sudah dibantu dengan 51 guru non PNS, dan mata pelajaran Bahasa Indonesia sebanyak 1 guru dan sudah dibantu dengan 25 guru non PNS. ada 1 mata pelajaran yang dapat diatasi dengan sistem mutasi yaitu mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa.

2. Menentukan Kriteria Evaluasi

Kriteria adalah pernyataan khusus tentang dimensi-dimensi sasaran (*objectives*) yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif kebijakan atau program Patton dan Savicky, (1986) Pada penelitian ini menggunakan kriteria;

a. Kriteria manfaat (*benefit*)

Kriteria manfaat sangat lazim ditemui dalam analisis kebijakan, yaitu berkenaan dengan peluang untuk tercapainya tujuan kebijakan. Pada penelitian ini masalah utamanya adalah tidak meratanya guru SMA Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tujuan utama kebijakannya adalah jumlah guru SMA Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terjadi kebutuhan atau sama dengan jumlah guru SMA merata.

b. Kriteria posisi (*standing*)

Pendekatan ini mendasarkan pada pendekatan *pareto optimum*, yaitu pencapaian suatu tujuan tanpa merugikan pihak lain seperti siswa yang dapat mengalami kekosongan jam pelajaran jika ada kekurangan guru mata pelajaran tertentu.

c. Kriteria keadilan (*equity*)

Keadilan mengacu pada distribusi barang dan jasa di antara masyarakat. Pertanyaan kriteria keadilan berkenaan dengan pertanyaan dari sisi konsumsi (siapa yang mendapat manfaat) dan dari segi produksi (siapa yang membayar). Jika jumlah guru SMA Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengalami kekurangan dan kelebihan guru yang mendapat manfaat adalah siswa dan sekolah dan yang memproduksi agar jumlah guru terpenuhi adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini seperti keadilan distribusi atau keadilan horizontal.

3. Mengidentifikasi alternatif

Metode untuk mengidentifikasi alternatif pada penelitian ini dengan cara metode modifikasi dari kebijakan atau solusi dari permasalahan yang sedang berjalan. Berikut alternatifnya:

a. Membuat data untuk proyeksi guru yang akan pensiun.

Alternatif ini dibuat karena adanya permasalahan tidak ada proyeksi untuk guru pensiun. Jadi pihak sekolah sewaktu ada guru pension harus menunggu semester berganti karena pelaporan kebutuhan guru dari pihak sekolah ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dilakukan setiap semester atau 2 kali dalam setahun, sedangkan guru pensiun pada saat proses semester sedang berjalan. Hal ini menimbulkan kekosongan dan pihak sekolah harus mencari guru pengganti untuk mengisi kekurangan guru dengan cara merekrut tenaga bantu. Kalau ada alternatif ini

- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dapat lebih awal mengajukan proposal pemenuhan kebutuhan guru ke BKD.
- b. Pihak sekolah mengajukan permintaan formasi guru ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dengan catatan *urgent* supaya segera ditindaklanjuti (khusus guru meninggal dunia).

Alternatif ini dibuat akibat guru sebelumnya meninggal dunia karena sekolah tidak dapat mengantisipasi kejadian ini.
 - c. Pihak sekolah melakukan rekrut guru tenaga bantu (naban).

Alternatif ini dibuat jika pada alternatif 2 tidak segera ditangani oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dan BKD.
 - d. Proses pengajuan formasi kebutuhan guru ke BKD dilakukan setiap semester pembelajaran.

Alternatif ini dibuat karena pada saat ini pengajuan formasi kebutuhan guru ke BKD dilakukan setiap dua semester sekali yang mana rentan waktunya terlalu lama jika ada sekolah yang memiliki kebutuhan guru.
 - e. Penataan kembali untuk sekolah yang memiliki kelebihan dan kekurangan jumlah guru.

Alternatif ini dibuat karena terlalu banyak kebutuhan jumlah guru entah itu kekurangan atau kelebihan jumlah guru. alternatif ini juga sebagai langkah awal untuk mengendalikan kebutuhan jumlah guru.
 - f. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat daftar mutasi guru dan ditaawarkan ke guru.

Alternatif ini dibuat karena pada saat ini guru mutasi yang mengajukan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - g. Aplikasi SIYAP (Sistem Informasi Layanan Kepegawaian) ditambahkan fitur untuk publikasi data.

Alternatif ini dibuat karena dalam aplikasi SIYAP ini hanya bisa diakses untuk pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, admin sekolah dan guru sekolah saja masyarakat umum yang membutuhkan data untuk kepentingan penelitian tidak bisa mengakses.
 - h. Monitoring kebijakan kebutuhan guru dilakukan secara berkala ke semua SMA yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alternatif ini dibuat karena saat ini seluruh SMA Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mendapatkan monitoring secara merata. Monitoring yang dilaksanakan oleh staf dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga hanya beberapa sekolah saja.
 - i. Guru berstatus PNS yang termasuk dalam hitungan kelebihan jumlah guru dapat dimutasikan ke provinsi lain yang membutuhkan kekurangan jumlah guru.

Alternatif ini dibuat karena ternyata terdapat permasalahan banyak ketersediaan atau kelebihan jumlah guru yang berstatus PNS. Hal ini merugikan pemerintah karena dana yang dialokasikan untuk gaji PNS terhitung tinggi. Selain itu, alternatif ini juga akan bermanfaat bagi Provinsi sekitar DIY karena dapat memenuhi kekurangan guru yang ada.
 - j. Guru berstatus non PNS yang termasuk dalam hitungan kelebihan jumlah guru dapat di rumahkan.

Alternatif ini dibuat karena terdapat permasalahan banyak ketersediaan atau kelebihan jumlah guru yang berstatus non PNS. Hal ini merugikan sekolah karena jika guru non PNS tidak *dibackup*

oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta artinya pihak sekolah yang menggaji.

4. Evaluasi Alternatif Kebijakan

Evaluasi alternatif kebijakan dapat dilakukan dengan membandingkan berbagai alternatif kebijakan dengan memanfaatkan informasi hasil peramalan dampak setiap alternatif berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan basis rasional yang digunakan.

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah; efektifitas, efisiensi, kecukupan (*adequacy*), responsifitas (*responsiveness*), dan kelayakan (*appropriateness*)

5. Menyajikan Alternatif kebijakan

Setelah proses evaluasi alternatif kebijakan di atas yang selanjutnya adalah menyajikan alternatif kebijakan. Pada tahap ini akan menyajikan alternatif yang telah di evaluasi lalu terpilih dan layak untuk dijadikan alternatif kebijakan.

- a. Membuat data untuk proyeksi guru yang akan pensiun.

Alternatif ini akan mempermudah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Untuk Menyiapkan Formasi Kebutuhan Guru Ke BKD Lebih Awal Tidak Usah Menunggu Guru Pensiun Baru Mengajukan Formasi Ke BKD. Alternatif ini akan bermanfaat untuk jangka waktu yang panjang.

- b. Pihak sekolah mengajukan permintaan formasi guru ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dengan catatan *urgent* supaya segera ditindaklanjuti (khusus guru meninggal dunia).

Alternatif ini Akan Lebih Mempermudah Sekolah Untuk Pengadaan Guru Baru Akibat Guru Sebelumnya Meninggal Dunia Karena Sekolah Tidak Dapat Mengantisipasi Kejadian Ini.

- c. Proses pengajuan formasi kebutuhan guru ke BKD dilakukan setiap semester pembelajaran.

Alternatif ini akan memenuhi pemerataan kebutuhan guru karena rentan waktunya lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

- d. Penataan kembali untuk sekolah yang memiliki kelebihan dan kekurangan jumlah guru.

Alternatif ini akan menguntungkan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga walaupun kurang efisien di awal untuk pembiayaan mutasi guru tetapi setelahnya akan menggaji guru yang diperlukan pada sekolah saja tidak ada kelebihan guru yang akan meningkatkan jumlah pembiayaan dan layak dilaksanakan karena menguntungkan untuk pemerataan guru di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun daerah lain yang akan diberikan tenaga guru yang berlebih di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- e. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat daftar mutasi guru dan ditawarkan ke guru.

Alternatif ini akan menguntungkan bagi guru karena sudah ada daftar dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk mutasi, tidak perlu melakukan pengajuan mutasi

- f. Aplikasi SIYAP (Sistem Informasi Layanan Kepegawaian) ditambahkan fitur untuk publikasi data.

Alternatif ini menguntungkan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena aplikasinya bermanfaat bagi masyarakat umum juga tidak hanya pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dan guru yang dapat mengakses data tersebut.

- g. Monitoring kebijakan kebutuhan guru dilakukan secara berkala ke semua SMA yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alternatif ini layak dilaksanakan karena seluruh SMA Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta akan mendapatkan monitoring yang merata, tidak ada pilih-pilih sekolah untuk dilaksanakannya monitoring.

- h. Guru berstatus PNS yang termasuk dalam hitungan kelebihan jumlah guru dapat dimutasikan ke Provinsi lain yang membutuhkan kekurangan jumlah guru.

Alternatif ini efisien untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena biaya gaji PNS tinggi dengan dimutasikan dapat memotong anggaran daerah untuk kegiatan pemerintah lainnya

- i. Guru berstatus non PNS yang termasuk dalam hitungan kelebihan jumlah guru dapat di rumahkan.

Alternatif ini akan menguntungkan bagi sekolah karena meringankan alokasi dana untuk menggaji guru non PNS karena biaya di bebaskan ke pihak sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan guru SMA Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa 8 mata pelajaran memiliki kebutuhan jumlah guru. mata pelajaran Fisika memiliki

kelebihan jumlah guru paling tinggi yaitu sebanyak 35 guru. Selanjutnya secara berturut-turut diikuti dengan mata pelajaran Biologi yang memiliki kelebihan jumlah guru sebanyak 32 guru. lalu mata pelajaran Kimia dengan 24 guru, mata pelajaran Ekonomi 22 guru, mata pelajaran PPKN 13 guru, mata pelajaran Sosiologi dan geografi sebanyak 11 guru, dan mata pelajaran Matematika sebanyak 4 guru. Kekurangan jumlah guru terdapat 2 mata pelajaran yaitu; mata pelajaran PJOK sebanyak 4 guru, dan mata pelajaran Bahasa Indonesia sebanyak 1 guru. Ada 1 mata pelajaran yang dapat diatasi dengan sistem mutasi yaitu mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan penataan dan pemerataan guru SMA di DIY belum optimal. Adapun alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga untuk meratakan kebutuhan guru SMA Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:

- a. Membuat data untuk proyeksi guru yang akan pensiun.
- b. Pihak sekolah mengajukan permintaan formasi guru ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dengan catatan *urgent* supaya segera ditindaklanjuti (khusus guru meninggal dunia)
- c. Proses pengajuan formasi kebutuhan guru ke BKD dilakukan setiap semester pembelajaran.
- d. Penataan kembali untuk sekolah yang memiliki kelebihan dan kekurangan jumlah guru.
- e. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat daftar mutasi guru dan ditaawarkan ke guru.
- f. Aplikasi SIYAP (Sistem Informasi Layanan Kepegawaian) ditambahkan fitur untuk publikasi data.

- g. Monitoring kebijakan kebutuhan guru dilakukan secara berkala ke semua SMA yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- h. Guru berstatus PNS yang termasuk dalam hitungan kelebihan jumlah guru dapat dimutasikan ke Provinsi lain yang membutuhkan kekurangan jumlah guru.
- i. Guru berstatus non PNS yang termasuk dalam hitungan kelebihan jumlah guru dapat di rumahkan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, peneliti mencoba memberikan beberapa saran kepada Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya pemerataan guru SMA Negeri di DIY sebagai berikut:

1. Menjadikan alternatif kebijakan yang ditemukan dalam penelitian ini sebagai acuan untuk pemerataan jumlah guru SMA Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dinas pendidikan selaku pemegang wewenang dalam melaksanakan penataan guru memiliki inisiatif untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat pemerataan kebutuhan guru SMA Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Dinas pendidikan harus mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap penataan guru. Dukungan tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan monitoring berkala ke semua sekolah dan juga untuk evaluasi program ditindaklanjuti lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi,*

dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada.

Creswell, John, W. (2002). *Desain Penelitian.* Jakarta: KIK Pres

Dewi, Z.R. (2019). *Penataan Guru Mata Pelajaran Matematika SMA Negeri di Provinsi Jawa Timur.* Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). *PERGUB No 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.* Yogyakarta.

Isma, F., Murniati, A.R., Niswanto. (2017). *Analisis Kebijakan perencanaan Kebutuhan Guru SMA di Kabupaten Aceh Tengah.* Administrasi Pendidikan, 5, 4.

Jumadi, Prasetyo, Z.K., Wilujeng, I. (2013). *Pemerataan Kompetensi Pedagogik, Profesional, Kepribadian dan sosial Guru Fisika SMA/MA di Daerah Istimewa Yogyakarta.* Laporan Penelitian Pengembangan Keahlian Guru Besar, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Patton & Sawicki, D. (1986). *Basic Method of Policy Analysis and Planing.* Prentice Hall; Michigan University.

Pemerintah Pusat. (2005). *Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.* Jakarta

Kemenag. (2011). *Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan. Dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011*

- SPB/03.M.PAN-RB/10/2011* 48
TAHUN 2011 158/PMK.01/2011 11
TAHUN 2011 Tentang Penataan Dan
Pemerataan Guru Pegawai Negeri
Sipil. Jakarta
- Kinali, B.I. (2015). *5 Kewenangan Bidang Pendidikan II Menjadi Urusan Daerah*. Retrieved publisher: <https://bangimam-berbagi.blogspot.com/2015/12/6-kewenangan-bidang-pendidikan-ini.html>
- Mada Saputra, (2005). *Analisis Kebijakan Pendidikan (suatu pengantar)*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Presindo.